

BAB I

A. Alasan Pemilihan Judul

Memilih judul merupakan tahapan awal dalam pembuatan sebuah makalah atau karya tulis, karena dari yang pertama inilah yang akan menentukan hasil dari yang terakhir. Dan bukanlah suatu hal yang mudah untuk menggambarkan dan membicarakan tentang negara Saudi Arabia. Negara yang terletak di kawasan Timur Tengah ini merupakan negara yang penuh cerita dalam setiap perkembangan perekonomiannya maupun pemerintahannya yang penuh dengan pergolakan baik secara intern maupun extern (pergolakan yang dipengaruhi negara lain).

Mengapa saya katakan menulis negara Saudi Arabia atau menulis tentang kawasan Timur Tengah bukanlah merupakan suatu hal yang mudah, karena seperti yang telah diketahui bahwa hampir setiap negeri yang berada di kawasan ini hampir setiap saat selalu mengalami perubahan-perubahan yang terjadi secara cepat ketika kita akan mengkaji sesuatu hal dari negara tersebut.

Kawasan Timur Tengah yang panas, baik secara peta geografis maupun politisnya. Karena di kawasan ini merupakan kawasan yang menjadi asal-usul agama Samawi (Islam, Kristen, Yahudi), memiliki keragaman etnis dan budaya, memiliki keanekaragaman orientasi / kesetiaan politik, berkembangnya aneka ideologi dan selalu adanya campur tangan negara-negara besar baik dalam perekonomian maupun pemerintahan di negara-negara Timur Tengah. Dan Saudi Arabia merupakan kawasan yang menjadi asal-usul agama Islam sehingga sangat

menarik untuk dikaji. Semakin maju jaman maka semakin berkembang pula pemikiran orang. Ditambah dengan perkembangan perekonomian yang maju pesat di negara ini semakin memiliki andil dalam perkembangan politiknya. Maka wajar saja apabila penulis tertarik untuk memaparkan sebuah penelitian berkaitan dengan Saudi Arabia, terutama dalam hal perkembangan perekonomian dan demokrasi di negara tersebut.

B. Latar Belakang Masalah

Demokrasi selalu menjadi tuntutan karena adanya anggapan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem yang bisa menjamin keteraturan publik sekaligus mendorong transformasi masyarakat menuju suatu struktur sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan yang lebih ideal. Oleh karenanya, dewasa ini tidak ada masyarakat, negara ataupun bangsa yang secara eksplisit menolak demokrasi, bahkan sistem ini sangat diharapkan. Namun baik dalam teori maupun dalam praktek banyak keraguan terhadap efficacy dari demokrasi tersebut. Proses demokratisasi memiliki sejarah yang sangat panjang yang tentunya tidak selalu berjalan mulus sesuai rencana.

Dalam arti harafiahnya, demokrasi (Inggris: *democracy*) berasal dari bahasa Yunani, yakni *demos* artinya rakyat dan *kratia* artinya pemerintahan.¹ Artinya, demokrasi merupakan pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat. Dalam pandangan modern, demokrasi dirumuskan oleh Abraham Lincoln, sebagai

¹ LALU CHAFI, M.A., *Demokratisasi Dan Proses Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta:

*government of the people, by the people, for the people.*² Artinya kekuasaan politik tertinggi ada ditangan rakyat, yaitu sistem pemerintahan oleh rakyat atau kekuasaan oleh rakyat, baik bersifat langsung maupun dengan sistem perwakilan.

Arab Saudi atau Saudi Arabia atau Kerajaan Arab Saudi adalah negara Arab yang terletak di Jazirah Arab³. Beriklim gurun dan wilayahnya sebagian besar terdiri atas gurun pasir dengan gurun pasir yang terbesar adalah Rub Al Khali. Orang Arab menyebut kata gurun pasir dengan kata sahara. Arab Saudi berbatasan langsung dengan Yordania, Irak, Kuwait, Teluk Persia, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman,⁴ Mesir, Tanah Kosong serta Laut Merah.⁵

Nama Saudi berasal dari kata Bani Saud sebagai keluarga kerajaan dan pendirinya. Arab Saudi terkenal sebagai Negara kelahiran Nabi Muhammad SAW serta tumbuh dan berkembangnya agama Islam, sehingga pada benderanya terdapat dua kalimat syahadat yang berarti *"Tidak ada tuhan (yang haq) untuk disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya."*⁶

Saudi Arabia dengan kekayaan minyak dan luas wilayahnya dianggap sebagai negara paling berpengaruh di dunia Arab. Pada masa dahulu daerah Saudi Arabia dikenal menjadi dua bagian yakni daerah Hijaz yakni daerah pesisir barat Semenanjung Arab yang didalamnya terdapat kota-kota diantaranya adalah Mekkah, Madinah dan Jeddah serta daerah gurun Nejed, yaitu daerah-daerah

² Ibid, hal 16.

³ http://id.wikipedia.org/wiki/Arab_Saudi

⁴ Harwanto Dahlan, Drs.MA, *Politik Dan Pemerintahan Timur Tengah*, Yogyakarta: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIPOL UMY, 1999, hal 1

gurun sampai pesisir timur semenanjung arabia yang umumnya dihuni oleh suku suku lokal Arab (Badui) dan kabilah-kabilah Arab lainnya.⁷

Pemerintah Saudi bermula dari bagian tengah semenanjung (jazirah) Arab yakni pada tahun 1750 ketika Muhammad bin Saud bersama dengan Muhammad bin Abdul Wahhab bekerja sama untuk memurnikan agama Islam. Tetapi sejak abad 18 Nejed direbut oleh Al-Rashid. Kemudian pada akhir abad 19 putra Muhammad bin Saud yaitu Abdul Azis Ibnu Saud yang lahir pada tahun 1880, berhasil menaklukkan kembali Riyadh. Selama 10 tahun setelah itu ia terus berperang melawan musuh-musuhnya baik yang berasal dari dalam maupun luar negerinya. Pada tahun 1902 Abdul Aziz menguasai Riyadh dari penguasa Al-Rashid, kemudian Al-Ahsa kemudian wilayah nejed antara tahun 1913-1926. Pada tanggal 8 Januari 1926, Abdul Aziz menjadi penguasa wilayah Nejed. Dengan menandatangani perjanjian di Jeddah pada tanggal 20 Mei 1927 Arab Saudi menyatakan kemerdekaannya.

Pemerintahan Monarki di Saudi Arabia merupakan perpaduan antara kekuasaan politik dan semangat keagamaan, sehingga mampu untuk melaksanakan modernisasi dan perubahan sosial dengan sangat cepat. Dua kota suci Makkah dan Madinah yang selalu dikunjungi oleh seluruh umat muslim di dunia, karena hal inilah perkembangan perdagangan dan pembangunan maju pesat hingga memajukan perekonomian Saudi Arabia.

Pertumbuhan ekonomi Saudi Arabia sangat diperkuat oleh penemuan minyak bumi menjelang perang dunia ke II. Minyak ditemukan di Saudi Arabia

⁷

oleh ahli geologi Amerika di awal 1930-an,⁸ meskipun begitu produksi minyak dalam skala besar belum dimulai hingga setelah perang dunia II. Kekayaan minyak telah memungkinkan perkembangan ekonomi yang cepat, yang benar-benar dimulai di awal 1960-an dan secara mencolok dipercepat pada 1970-an sehingga merubah kerajaan menjadi kaya raya.

Cadangan minyak Saudi adalah yang terbesar diseluruh dunia (hampir 25% cadangan minyak dunia dimiliki Saudi). Hanya Arab Saudi yang saat ini mampu menambah kapasitas produksinya dan merupakan eksportir minyak terbesar didunia⁹. Lebih dari 90% minyak Saudi di ekspor ke negara-negara lain dan menjadi hampir 75% pendapatan pemerintah Saudi.¹⁰ 95% lebih minyak Saudi di produksi atas nama pemerintah Saudi oleh perusahaan besar ARAMCO.

Karena peningkatan tajam pendapatan minyak Saudi di tahun 1974 akibat embargo minyak, menyusul perang Arab-Israel, Saudi Arabia menjadi negara yang pertumbuhan ekonominya tercepat di dunia. Saudi Arabia benar-benar menikmati surplus dari perdagangannya dengan negara lain, import meningkat cepat, dan pendapatan pemerintah yang meluas disediakan untuk pembangunan, pertahanan dan memberikan bantuan untuk negara-negara Arab dan Islam lainnya.

Berkat adanya kekayaan minyak Saudi Arabia mampu melaksanakan pembangunan 5 tahun yang pertama tahun 1975-1980, dengan anggaran sekitar 142.000 juta dollar Amerika. Selama periode (1970-1989), pembangunan di Saudi

⁸ http://72.14.203.104/search?q=cache:ycowz55CfoUJ:en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Saudi_Arabia+oil+boom,+saudi+arabia&hl=id&gl=id&ct=clnk&cd=3. Diterjemahkan secara bebas oleh penulis.

dari para umat Islam dari seluruh dunia yang menunaikan ibadah haji, memang pantas perekonomiannya didominasi factor minyak dan gas, karena memiliki seperempat dari cadangan minyak dunia. Penduduknya yang berjumlah hampir 26 juta jiwa itu, pada tahun 2003 memiliki pendapatan per kapita sebesar 8.561 dolar Amerika per tahunnya.¹² Pengangguran dan pendidikan masih menjadi masalah besar di Saudi Arabia. Saat ini pelajaran komputer dan bahasa Inggris sudah menjadi kewajiban. Salah satu alasan mengapa para lulusan Saudi sulit mendapatkan pekerjaan, adalah karena kekurangan mereka akan pemahaman computer dan bahasa Inggris. Tidak sebandingnya keterampilan kerja para lulusan Saudi dan kebutuhan lowongan kerja swasta dalam semua tingkatan merupakan halangan utama untuk perubahan ekonomi dan pembangunan, sekitar 4,6 juta orang non-Saudi dipekerjakan dalam bidang ekonomi.¹³

Penemuan minyak memang membawa perubahan besar dalam struktur finansial dan sosial Saudi sekaligus mengangkatnya ke posisi penting dalam percaturan Internasional. Dengan semua perubahan ini ada hal yang bertolak belakang dalam kedudukan Saudi Arabia. Di satu pihak, kekuatan dan pengaruhnya melejit diantara negara-negara Arab di Timur Tengah dan dia dengan bantuan Amerika, melaksanakan revolusi teknologi yang nyata.

Di lain pihak, pemerintahan dan sistem sosialnya tetap merupakan monarkhi absolut yang hanya dibatasi oleh hukum Islam. Suksesi Raja Saudi hingga Raja Fadh dilakukan tanpa pemungutan suara / pemilihan umum.¹⁴

¹² <http://www.rsi.sg/indonesian/fokusasia/view/20040923211500/1/.html>

¹³ http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Saudi_Arabia+oil+boom,+saudi+arabia&hl=id&gl=id&ct=clnk&cd=3.

¹⁴ "The Saudi Arabia" by ...

Meskipun demikian, proses teknologi mempengaruhi hubungan sosial. Pertumbuhan penduduk kota meningkat. Negara mendapat kelas pekerja industri yang terlatih dan tidak terlatih dengan pesat, dan pengrajin yang biasa dengan mesin-mesin modern. Jaringan listrik di beberapa kota disesuaikan dengan pola kehidupan sehari-hari. Kelas *white collar* yang sedikit jumlahnya dalam industri dan pemerintahan secara bertahap terbentuk. Hubungan dengan dunia luar melalui teknisi Amerika diperluas dan peningkatan kemakmuran negara sangat berpengaruh terhadap taraf hidup dan kebiasaan penduduk.

Sikap politik Fahd bin Abdul Aziz serta pengendaliannya atas sumber daya minyak nasional telah membantu Saudi Arabia memegang peranan penting di Timur Tengah. Upayanya itu juga memiliki pengaruh di dunia internasional. Fahd bin Abdul Aziz mulai memimpin Kerajaan Arab Saudi sejak 13 Juni 1982.¹⁵ Dia menjadi Raja Arab Saudi yang ke-5.

Fahd bin Abdul Azis menghabiskan sebagian masa dewasanya dibawah bayangan kakak-kakaknya. Selama 5 tahun Fahd bekerja sebagai Menteri Pendidikan pertama di bawah Raja Saud, kemudian selama 13 tahun dari tahun 1962 hingga 1975 menjadi Menteri Dalam Negeri di bawah Faisal. Kurang dari sepuluh tahun dari ledakan harga minyak Saudi Arabia memiliki salah satu sistem rumah sakit gratis dan paling modern untuk setiap warganya, dan fasilitas sosial baru di kerajaan itu merupakan yang terbaik yang bisa dibeli dengan uang.

Pemasukan kerajaan bukan hanya luar biasa besarnya, tetapi dibayarkan langsung kepada perbendaharaan negara. Lebih dari \$300 juta setiap hari uang

Untuk pertama kalinya untuk pertama kalinya dalam 73 tahun Saudi Arabia mengadakan pemilu untuk kursi di dewan lokal, sebuah langkah yang dilakukan Qatar enam tahun sebelumnya.¹⁸ Pemerintah Saudi mengembarkakan pemilu lokal ini sebagai peristiwa historik, dan secara luhai menyponsori konferensi antiterorisme internasional di ibukota Riyadh menjelang pemilu untuk menarik jurnalis asing yang mungkin tidak akan tertarik meliput pemilu lokal tersebut.

Keantusiasan ini tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa rezim Saudi sebenarnya telah menjanjikan reformasi politik pertama kali pada 1962. Tiga puluh tahun berlalu sebelum Raja Fahd mengisukan UUD negara, dan dia melakukan itu melalui dekrit kerajaan bukan melalui proses legislatif apa pun.

Kamis 10 Februari 2005, mereka untuk pertama kalinya mengikuti sebuah pemilihan umum berdasarkan standar internasional. Peristiwa ini dinilai sebagai langkah awal menuju kebebasan berekspresi, meski yang memberikan hak suara baru dari kalangan pria. Lebih dari 1.800 kandidat bertarung untuk memperebutkan 127 kursi di ibu kota Saudi Arabia, Riyadh dan beberapa desa di sekitarnya¹⁹. Berbeda dengan pemilu di berbagai negara yang diselenggarakan untuk memilih pemimpin nasional, pemilu pertama di Arab Saudi terbatas untuk memilih sejumlah pejabat kota. Selain itu, hanya kaum pria yang memiliki hak pilih serta mencalonkan diri. Sedangkan kaum wanita tidak mendapat kedua hak tersebut.

¹⁸ <http://www.indonesia.com/bpost/052005/27/opini/opini2.htm>

¹⁹ <http://www.indonesia.com/bpost/052005/27/opini/opini2.htm>

C. Pokok Permasalahan.

Dari latar belakang diatas muncul permasalahan: Mengapa perkembangan ekonomi Saudi Arabia tidak mendukung demokratisasi rejim Saudi Arabia?.

D. Kerangka Dasar Teori

Teori adalah bentuk penyelesaian paling umum yang memberitahukan kepada kita mengapa sesuatu terjadi dan kapan sesuatu bisa terjadi, dengan demikian selain digunakan untuk eksplanasi, teori juga menjadi dasar bagi prediksi. Dari pengertian diatas secara gamblang teori bisa dikatakan sebagai suatu pandangan / persepsi mengenai sesuatu yang sedang dan akan terjadi.

Dalam Ilmu Hubungan Internasional teori memegang posisi kunci yaitu sebagai alat analisis dan sebagai alat prediksi terhadap fenomena-fenomena yang terjadi dalam suatu negara. Dalam hal ini fungsi teori adalah sebagai kacamata untuk melihat dan memperjelas suatu fenomena agar dapat dengan mudah untuk dikaji seseorang. Sehingga teori yang saya gunakan untuk mengkaji masalah ini adalah:

Lipset makes a correlation between economic development and democracy. The more developed an economy is, the more probable democracy

*will be*²⁰. “Semakin tinggi pembangunan ekonomi di suatu negara semakin tinggi pula kemungkinan munculnya demokratisasi di negara tersebut”.

(Seymour M. Lipset).

Tanpa ada pertumbuhan ekonomi, sulit bagi diciptakannya pemerintahan dan masyarakat demokratis. Argumentasi kesimpulan ini cukup jelas. Hanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi, suatu masyarakat bisa meningkatkan pendapatan dan tingkat kesejahteraannya secara mengesankan sehingga memungkinkan mereka bisa berpartisipasi secara efektif dalam lapangan politik dengan tingkat tanggung jawab yang mencukupi.

Hal ini terjadi karena semakin tinggi tingkat kemakmuran suatu negara, maka akan semakin tinggi tingkat pendidikan warganya. Hal inilah yang kemudian akan mendorong timbulnya demokratisasi yang akhirnya mengubah negara tersebut menjadi negara demokrasi. Seperti yang terjadi di Eropa dan Amerika Serikat pada abad 19 dan awal abad 20 muncul demokratisasi ketika GNP/Capita mencapai \$300 - \$500. Sebaliknya, masyarakat yang masih berkebutuhan memenuhi kebutuhan dasar-seperti sandang, pangan, dan papan dipastikan tidak akan dapat menopang pelaksanaan praktek demokrasi. Lipset menekankan hubungan antara demokratisasi, pembangunan ekonomi dan kondisi sosial masyarakat berstrata bawah, menengah, dan atas. Bagi masyarakat bawah, pembangunan ekonomi berarti :

- Meningkatnya penghasilan.
- Meningkatnya kesempatan memperoleh pendidikan.

- Meningkatnya kesempatan untuk menaruh perhatian pada masalah politik (biasanya masyarakat miskin apatis hanya memikirkan masalah untuk bertahan hidup saja).
- Ketertarikan masyarakat miskin untuk revolusi menurun, lebih menyukai perubahan politik secara gradual.

Bagi masyarakat menengah, pembangunan ekonomi berarti :

- Memperbesar jumlah kelas menengah (struktur masyarakat diamond).
- Kelas menengah lebih menyukai parta-partai yang moderat, bukan yang ekstrim (norwegia, swedia, denmark : kelas menengah besar maka politiknya stabil).

Pendapat lipset diatas mengasumsikan, semakin tinggi penghasilan ekonomi suatu negara, semakin banyak jumlah kelas menengah dan buruh di negara itu. Kelas menengah merupakan sekelompok individu yang memiliki kemandirian secara ekonomi dan politik. Kelas menengah bisa didefinisikan sebagai kaum terpelajar kota yang bekerja sebagai profesional, manajer, ahli, intelektual. Mereka umumnya mengandalkan ijazah, kemampuan managerial, dan birokrasi sebagai modal kerja. Politik kelas menengah, pada hakekatnya berpihak pada kepentingan materiil mereka sendiri.

Semakin banyak kelas menengah dan buruh, semakin besar tuntutan partisipasi politik dan kompetisi. Sejarah demokrasi di Barat-pun tumbuh berkat dorongan kelas menengah. Seperti yang dikemukakan Barington Moore:

"*No bourgeois, no democracy*," kata Barrington Moore²¹. Demokrasi akan tumbuh dan berkembang jika kelas borjuis menjadi kuat dan aktif dalam proses demokratisasi, begitu argumen Moore²².

Prioritas menuju demokratisasi, dalam hal ini, adalah pertumbuhan ekonomi. Dalam level ekonomi yang sudah maju, pendidikan modern diasumsikan sudah meluas. Dimana pendidikan modern memberikan berbagai nilai dan kapasitas yang dibutuhkan oleh institusi demokrasi seperti kompetensi teknis, berpikir kritis dan independensi warga negara. Kondisi psikologis yang menghargai keberagaman, sikap empati dan rasional dapat dilahirkan oleh pendidikan modern. Hal ini sangatlah penting dalam sistem demokrasi yang penuh persaingan. Dengan begitu, negara yang maju, atau pertumbuhan ekonominya tinggi, diasumsikan akan lebih demokratis daripada negara yang belum maju. Pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan perluasan kelas pengusaha, kelas menengah, dan kelas pekerja-industri. Kelas atau golongan ini diasumsikan akan membuat lebih banyak tuntutan dan partisipasi politiknya. Ini membuat iklim yang kondusif untuk demokratisasi. Robert Dahl mensyaratkan paling tidak ada delapan cerminan demokrasi, antara lain:²³

1. Kebebasan membentuk dan bergabung dalam organisasi (berserikat dan berkumpul);

²¹ <http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1996/12/19/0024.html>

²² http://64.233.167.104/search?q=cache:y6K_h6H_bX0J:www.freelists.org/archives/ppi/11-2005/msg00274.html+barrington+moore+dan+teori+kelas+menengah&hl=id&gl=id&ct=clnk&cd=4

²³ Sidik Jatmika, *AS Penghambat Demokrasi, Membongkar Politik Standar ganda Amerika Serika*, Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 2000, hal 3.

2. Kebebasan berekspresi (mengeluarkan pendapat);
3. Hak memilih dan dipilih;
4. Kesempatan yang relatif terbuka untuk berkompetisi mendapatkan dukungan atau memberi dukungan;
5. Hak bagi pemimpin politik untuk berkompetisi mendapatkan dukungan atau memberi dukungan;
6. Alternatif sumber-sumber informasi;
7. Pemilu yang bebas dan adil;
8. Pelembagaan pembuatan kebijakan pemerintahan yang merujuk atau tergantung suara rakyat lewat pemungutan suara maupun cara-cara lain yang sejenis.

Dahl (1996) dalam pencatatan terhadap negara dalam hal kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemilu dan berposisi terhadap penguasa, mengelompokkan kerajaan Saudi Arabia ke dalam kelompok terendah nilainya (skala urutan ke-31 dari 31 skala yang ada). Atau dengan kata lain, Saudi Arabia termasuk dalam kelompok negara yang paling tidak demokratis di dunia.

Dalam kasus Saudi Arabia, perkembangan ekonominya maju pesat akibat adanya industri minyak sehingga melahirkan banyak buruh industri juga kelompok-kelompok lain. Pada awal pemerintahan Raja Fahd, pendapatan per kapita rakyat Saudi mencapai US\$17.000. Beberapa tahun setelah Fahd mulai dikukuhkan sebagai Raja, Saudi merasakan dampak fluktuasi harga minyak, yang juga mengakibatkan pendapatan per kapita menurun. Perlahan namun pasti

Saudi berhasil mengatasinya, terbukti pada tahun 2003 pendapatan perkapita Saudi mencapai US\$7.564 dan tahun 2004 meningkat lagi menjadi \$12,000.²⁴

Tambahan kekayaan mendadak ini berakibat revolusioner bagi situasi dalam negeri. Pembangunan teknologi di berbagai bidang mulai dijalankan dengan bantuan dan kerja sama dengan Amerika Serikat. Dengan semua perubahan tersebut ada hal yang bertolak belakang, yaitu disatu pihak kekuasaan dan pengaruh Saudi Arabia melejit diantara negara-negara Arab di Timur Tengah dan dengan bantuan Amerika melaksanakan revolusi teknologi yang nyata, di lain pihak pemerintahan dan sistem sosialnya merupakan monarki absolut yang hanya dibatasi oleh hukum Islam.

Seiring perkembangan jaman, pola pikir dan pengetahuan mereka pun berkembang sehingga tuntutan demokrasi datang dari berbagai kelompok, seperti kelas *White Collar* yang didukung oleh pengungsi Palestina. Meskipun bidang pendidikan sedikit terlambat mendapatkan perhatian pemerintah, namun hal ini banyak mempengaruhi pola pikir rakyat Saudi. Apabila, rencana pembangunan Saudi yang pertama dan kedua ditekankan pada infrastruktur, rencana ketiga (1980-1985), penekannya diubah. Pengeluaran untuk infrastruktur dikurangi, dan dialihkan untuk pengembangan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial.

Tumbuhnya kelas pedagang kaya akibat perluasan industri minyak, lulusan-lulusan Universitas barat, dan tentara-tentara yang makin berpandangan maju mengenai pemerintahan menambah tuntutan demokratisasi. Selain kelompok

²⁴ *World Development Report 2005*, World Bank, Washington, DC, 2005.

tersebut, yang dianggap paling progresif adalah kelompok cendekiawan. Namun demikian, dominasi keluarga kerajaan membatasi keinginan mereka untuk dapat memiliki kekuasaan dalam kerajaan Saudi Arabia. Sehingga akhirnya banyak dari mereka hanya menjadi oposisi, diantaranya yang menjadi perhatian penguasa Saudi adalah Advice and Reformation Committee (ARC) yang dipimpin oleh Osama bin Laden, seorang Sunni dan mantan Laskar Mujahidin dalam perang afganistan, dan Committee for Defence of Legitimate yang dipimpin oleh Muhammad Nassari yang bermarkas di London. Sekalipun perkembangan ekonomi dan pendidikan memang memunculkan kelas menengah, namun yang menjadi masalah, kelas menengah di Saudi bukanlah kelas menengah seperti yang ada di Barat. Di Saudi Arabia, Kelas menengah biasanya diduduki kaum bangsawan kerabat raja²⁵, dan mereka sama sekali tidak independen.

Penemuan minyak di Saudi Arabia memang membawa perubahan besar dalam struktur finansial dan sosial Saudi sekaligus mengangkatnya ke posisi penting dalam percaturan Internasional. Dengan semua perubahan ini ada hal yang bertolak belakang dalam kedudukan Saudi Arabia. Di satu pihak, kekuatan dan pengaruhnya melejit diantara negara-negara Arab di Timur Tengah dan dia dengan bantuan Amerika, melaksanakan revolusi teknologi yang nyata. Di lain pihak, pemerintahan dan sistem sosialnya tetap merupakan monarkhi absolut yang hanya dibatasi oleh hukum Islam.

²⁵ <http://www.indonesia.com/sripo/2003/04/09/0904fok4.htm>

E. Hipotesa

Dilihat dari permasalahan yang muncul dan didukung oleh kerangka dasar teori, maka penelitian ini akan dimulai dari hipotesa:

Perkembangan ekonomi Saudi Arabia yang maju pesat ternyata tidak berbanding lurus dengan demokratisasi di Saudi Arabia, karena pertumbuhan ekonomi yang maju pesat di Saudi Arabia tidak melahirkan kelas menengah yang compatible dengan demokrasi, yaitu kelas menengah yang independen, powerful dan memiliki achieve status.

F. Jangkauan Penelitian

Di dalam penulisan ini, penulis menggunakan batasan waktu pada masa pemerintahan Raja Fahd bin Abdul Azis. Selain itu penulis juga memasukkan fenomena-fenomena politik yang terjadi pada masa lalu dan sekarang dan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi diluar yang mempunyai relevansi dengan maksud untuk memperoleh penjelasan yang lebih komprehensif.

G. Tujuan Penulisan

Dalam hal ini tujuan penulisan adalah:

1. Sebagai wahana penulis untuk menasah kemampuan menganalisa

2. Sebagai wahana untuk memperdalam ilmu pengetahuan mengenai Islam, perekonomian, demokratisasi, Saudi Arabia.
3. Mengaplikasikan teori yang selama ini dipelajari oleh penulis.
4. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Fakultas ISIPOL UMY.

H. Metode Penelitian

Dalam penyusunan / penulisan skripsi ini, penulis lebih menitik beratkan pada studi kepustakaan. Dengan studi kepustakaan ini penulis berharap nantinya bisa menemukan data-data / fakta-fakta yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji.

Sumber data kepustakaan yang penulis gunakan berasal dari berbagai literatur, buku, laporan penelitian, jurnal, internet dan sumber-sumber lainnya yang sekiranya bisa dipergunakan untuk mengupas masalah ini. Sedangkan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah eksplanasi mengapa perkembangan ekonomi Saudi Arabia tidak mendukung demokratisnya rejim Saudi Arabia.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah hasil karya tulis ini maka perlu adanya penyusunan yang teratur dan sistematis. Hal ini dimaksudkan agar penyajian karya tulis ini dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Oleh karena itu, karya tulis ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab:

BAB I. Pendahuluan. Dalam bab ini berisi tentang alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar teori, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. Rezim Saudi Arabia. Bab ini memberikan gambaran mengenai sejarah dinasti saud, Rezim Abdul Azis Ibnu Saud, Rezim Saud Ibnu Abdul Azis, Rezim Faisal, Rezim Khalid bin Abdul Azis, Rezim Fadh Bin Abdul Azis, dan Rezim Abdullah Bin Abdul Azis.

BAB III. Perkembangan Ekonomi dan Demokrasi di Saudi Arabia. Bab ini menggambarkan pesatnya perkembangan ekonomi Saudi Arabia dan lambatnya demokratisasi di Saudi Arabia.

BAB IV. Paradoks Perkembangan Ekonomi dan Demokrasi di Saudi Arabia. Bab ini berisi perkembangan kelas menengah, kelompok oposisi Saudi Arabia serta tuntutan mereka terhadap demokratisasi rejim Saudi.

BAB V. Kesimpulan. Bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang ditarik dari pembuktian pada Bab III dan Bab IV yakni pertumbuhan ekonomi Saudi Arabia yang pesat tidak mendorong demokratisasi Rezim Saudi Arabia.